

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MEDAN NOMOR: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN**

Oleh,

I Kadek Maheni, NIM. 1914101091

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian izin penetapan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran. (2) Untuk Mengetahui secara yuridis pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepastakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim memberikan izin untuk mendapatkan penetapan permohonan pemohon Lisa dan Suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang karena perkawinan adalah sah dalam agama dan kepercayaan yang sudah berlangsung kurang lebih 15 Tahun, Pemohon dan suami pemohon sudah memiliki 4 orang anak, pemohon adalah domisili asli Medan, jika hakim tidak memberikan penetapan izin maka akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena tidak memiliki akta perkawinan. (2) Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Hakim tidak memberikan sanksi yang tertulis pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal 4 menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan”

Kata-kata Kunci : *Perkawinan Campuran, Pencatatan Perkawinan, Catatan Sipil.*

**JURIDICAL REVIEW OF DECISION OF MEDAN STATE COURT NUMBER:
117/Pdt.P/2019/PN-Mdn CONCERNING MIXED MARRIAGE POPULATION
ADMINISTRATION**

By,

I Kadek Maheni, NIM. 1914101091

Law Departement

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the basic considerations used in the Medan District Court Decision Number 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn regarding the granting of permission to determine population administration in mixed marriages. (2) To find regularly juridical review of the implementation of the administration of mixed marriages in Medan State Decision Number 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. The type of research used in this study is normative juridical research, with a type of approach through legislation and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is document and literature studies. The results of this study indicate that (1) the basis for consideration of the judge giving permission to obtain the determination of the petition of the applicant Lisa and the husband of the applicant Raymond Cheah Sin Liang because the marriage is legal in religion and belief that has lasted approximately 15 years, the applicant and the husband of the applicant already have 4 people child, the applicant is a native Medan domicile, if the judge does not give a permit determination it will have an impact on the applicant and the applicant's husband because they do not have a marriage certificate. (2) Based on a juridical analysis of the decision of the Medan District Court Number 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn the Judge did not give the sanction written in Article 61 of Law Number 1. Year 1974 paragraph 2 which reads "anyone who enters into a mixed marriage without showing in advance to the authorized registrar, a certificate or a decision to replace the statement in Article 4 states that a prison sentence of up to 1 month will be received.

KeyWords : *Mixed Marriage, Marriage Registration, Civil Registry.*